

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan runtuhnya kekuasaan Soeharto, menjadi titik awal penting bagi transisi menuju era demokrasi di Indonesia. Perubahan politik ini membawa dampak besar terhadap kehidupan berorganisasi, termasuk bagi Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Dalam suasana yang baru, LPSM sebagai organisasi non-pemerintah mendapatkan ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang. Pesatnya pertumbuhan LSM maupun LPSM setelah reformasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi yang muncul, serta keragaman program dan kegiatan yang mereka jalankan.

Keberadaan LPSM tercermin dari perannya dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Sejak runtuhnya rezim otoriter, LPSM berperan aktif dalam memperkuat demokrasi melalui berbagai upaya, seperti mendorong pembentukan lembaga-lembaga kuasi-negara serta melakukan advokasi dan pemberdayaan di tingkat akar rumput.¹ LPSM merupakan organisasi yang bekerja secara independen dari pemerintah, meskipun seringkali mereka berkolaborasi dengan lembaga negara, organisasi internasional, atau pihak swasta untuk

¹ Ah Maftuchan et al., *Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*, (Jakarta: PRAKARSA, 2021). Hal. 1-2.

mencapai tujuan bersama. Independensi ini menjadi karakteristik utamanya, sehingga mereka lebih fleksibel dalam mengadvokasi isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, LPSM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan yang lebih besar, sekaligus menjadi wadah bagi aspirasi warga.

Secara umum, LSM maupun LPSM memiliki cakupan kerja yang beragam, mulai dari isu-isu hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan. Mereka sering kali berfokus pada kelompok masyarakat yang rentan, seperti nelayan, masyarakat miskin kota, atau perempuan di wilayah marginal yang seringkali terabaikan dalam kebijakan publik. Philip Eldridge dalam Mansour Fakih membagi gerakan organisasi tersebut ke dalam dua kategori utama, yaitu yang berorientasi pada 'pembangunan' dan yang berfokus pada 'mobilisasi'. Pada agenda pembangunan umumnya menjalankan kegiatan pengembangan masyarakat secara konvensional, terutama dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Sementara itu, dalam kategori mobilisasi lebih menitikberatkan pada penggerakan masyarakat dalam merespon isu-isu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga permasalahan tunawisma.² Pendekatan partisipatif juga menjadi ciri khasnya, di mana mereka tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.

² Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), Hal. 120.

LSM dan LPSM sebagai representasi entitas publik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol publik sehingga mampu berperan sebagai pendorong dalam advokasi kebijakan, edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran publik, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat perannya. Salah satu bentuk kontrol yang dilakukan adalah mengawasi proses anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Salah satu LPSM yang berperan aktif dalam isu-isu sosial dan anggaran adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah salah satu Lembaga yang berfokus pada advokasi anggaran publik untuk mendorong keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas. FITRA bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, berpihak kepada kelompok rentan dan marjinal.³

FITRA memiliki visi untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang terbuka, adil, dan berpihak pada keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, FITRA secara aktif memantau penganggaran di berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup. FITRA menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran. FITRA mendorong pemerintah agar anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat rentan, termasuk nelayan di wilayah pesisir yang seringkali diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan.

³ Tentang Kami “Seknas FITRA”, diunduh di: <https://seknasfitra.org>, pada 9 Maret 2025.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola anggaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran ini mencakup pengaturan terhadap berbagai sumber pendapatan serta alokasi belanja negara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, APBN menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun sebagai kelompok masyarakat marjinal, nelayan sering kali terpinggirkan dalam kebijakan anggaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pesisir, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat nelayan sebagian besar masih terperangkap dalam kemiskinan dan tempat tinggal yang kurang layak.

Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan pentingnya akses terhadap sanitasi yang layak, kenyataannya kawasan permukiman pesisir justru sering menghadapi buruknya pengelolaan sanitasi lingkungan dan kurang menjadi prioritas dalam pembangunan. Masalah ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Pengelolaan sanitasi mencakup kebersihan pribadi dan lingkungan, termasuk sanitasi perumahan, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 kematian setiap tahun disebabkan oleh air yang tercemar, sanitasi yang tidak memadai, dan praktik kebersihan yang rendah. Kurangnya pasokan air bersih, toilet, sistem pembuangan

limbah, tempat pembuangan sampah, dan perumahan yang tidak sehat merupakan gambaran umum di kawasan pesisir.

Permasalahan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah menjadi isu yang sangat penting di wilayah pesisir, terutama di komunitas nelayan. Keterbatasan akses air bersih di wilayah ini seringkali disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti saluran air bersih. Akibatnya, banyak nelayan dan keluarganya yang terpaksa menggunakan air yang kurang higienis untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan minum. Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang dimana pemerintah harus menyediakan air bersih yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat atas air. Hak ini mencakup akses terhadap air dalam jumlah yang memadai, berkualitas baik, aman untuk digunakan, berkelanjutan, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari demi kehidupan yang sehat dan layak.⁴

Selain itu sanitasi juga masih menjadi tantangan besar karena sebagian besar komunitas nelayan belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Penyediaan fasilitas sanitasi di wilayah pesisir masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk tetap melakukan buang air besar di ruang terbuka, sungai, atau

⁴ UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diunduh di: <https://peraturan.bpk.go.id>, pada 9 Maret 2025.

saluran drainase. Situasi ini semakin diperburuk oleh keberadaan kelompok masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, hidup dalam kemiskinan, serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, ketiadaan toilet di rumah dan penggunaan saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak memenuhi standar kesehatan juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Selanjutnya masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius di komunitas nelayan. Tidak adanya tempat pembuangan yang layak serta aktivitas nelayan menghasilkan limbah organik dan anorganik membuat sampah sering kali menumpuk di wilayah tempat tinggal nelayan. Sampah ini tidak hanya merusak ekosistem laut yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat kerusakan habitat ikan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat nelayan. Wilayah pesisir Dadap merupakan salah satu contoh komunitas nelayan yang sedang menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Dadap menjadi salah satu program advokasi FITRA dalam mendorong transparansi anggaran dan perencanaan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini penting dilakukan karena akses WASH sebagai bagian dari SDGs masih belum tercapai dan menjadi permasalahan yang sering dihadapi kelompok nelayan. Jadi penting untuk melihat bagaimana cara FITRA mengadvokasi permasalahan tersebut, serta menganalisis capaian advokasinya berdasarkan kekurangan dan kelebihan. Sehingga penelitian ini penting karena akan menjadi bahan

masukannya bagi FITRA maupun LSM/LPSM lain yang kedepannya ingin mengadvokasi permasalahan yang sama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai advokasi FITRA pada komunitas nelayan di wilayah Dadap Tangerang. Dengan itu maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul *“Peran Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat FITRA Dalam Advokasi Lingkungan Permukiman Nelayan di Dadap Tangerang”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran FITRA dalam mengadvokasi lingkungan permukiman nelayan Dadap?
2. Bagaimana analisis peran FITRA pada lingkungan permukiman nelayan Dadap melalui teori Advokasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ada, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan peran FITRA dalam advokasi permasalahan lingkungan permukiman nelayan di Dadap Tangerang.

2. Untuk menganalisis peran FITRA pada lingkungan permukiman nelayan Dadap melalui teori Advokasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan membahas konsep atau penelitian yang sama supaya bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa dalam mengembangkan penelitian. Penelitian ini ingin menganalisa tentang advokasi LSM dengan menggunakan beberapa konsep advokasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi anggaran dan keadilan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang sosiologi karena dapat memberikan kontribusi teoritis melalui teori advokasi terhadap pemahaman tentang peran yang dilakukan oleh LSM, khususnya dalam konteks advokasi FITRA pada permukiman nelayan Dadap.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pihak LSM atau LPSM

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi untuk memahami bagaimana cara dari suatu LSM atau LPSM, khususnya FITRA dalam mencapai visi dan misinya yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi FITRA berdasarkan analisis kekurangan dalam advokasinya. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi LSM lain karena menunjukkan bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan FITRA sehingga dapat merumuskan strategi efektif dalam mendorong perubahan kebijakan dan layanan publik pada permasalahan yang serupa. Dengan mempelajari cara kerja FITRA, LSM lain dapat mengadopsi metode serupa untuk memperkuat suara kelompok rentan, seperti nelayan, dalam proses pengambilan keputusan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memahami mekanisme serta tahapan dalam proses kebijakan, di mana mereka memiliki hak untuk menyampaikan keberatan melalui berbagai jalur yang sah secara hukum, termasuk bekerja sama dengan organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam upaya mendorong terjadinya perubahan kebijakan.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar membuat pemerintah lebih mengetahui dan semakin peduli dalam permasalahan nelayan yang sering diabaikan, selain itu juga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan bahwa kebijakan publik harus melalui berbagai proses dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang akan diteliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait peran FITRA dalam advokasi lingkungan permukiman nelayan. Untuk itu, tinjauan terhadap penelitian sejenis diperlukan guna mengetahui perspektif dan pendekatan yang telah digunakan dalam menganalisis peran advokasi LSM, sehingga penulis melakukan tinjauan dari berbagai macam literatur sejenis, yang terdiri dari 6 artikel nasional dan 3 artikel internasional. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, akan dianalisis berbagai pendekatan, konsep atau teori, dan temuan terkait peran LSM, advokasi, dan kondisi lingkungan permukiman nelayan sehingga dapat melengkapi analisis penulis.

Penulis memilih dan menyeleksi sumber-sumber yang akan disebutkan dengan pertimbangan bahwa semua literatur sesuai dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada pembahasan mengenai permasalahan lingkungan yang dialami oleh nelayan dan mengetahui cara atau peran FITRA dalam mengadvokasi permasalahan tersebut yang diharapkan berimplikasi atau berdampak melalui beberapa program yang dapat direalisasikan.

Semua literatur ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang didasarkan pada kerangka konseptual; kelompok 1 (Peran LSM), kelompok 2 (Advokasi LSM), kelompok 3 (Kondisi Lingkungan Permukiman Nelayan). Dengan pengelompokan ini, penulis berharap dapat menyajikan pembahasan yang lebih terstruktur dan menghubungkan temuan-temuan dalam literatur dengan kerangka konseptual penelitian. Hal ini akan membantu menggali lebih dalam mengenai bagaimana peran advokasi yang dilakukan oleh FITRA pada permasalahan lingkungan yang dialami oleh nelayan.

Kelompok pertama yaitu Peran LSM, hal ini mencakup peran LSM kepada masyarakat khususnya nelayan atau kelompok pesisir. Artikel yang berjudul *“Navigating the Seas of Change: NGOs at the Helm of Fisheries Conservation and Development”* yang ditulis oleh Meenatchi, Abuthagir Iburahim, Asha T. Landge, Bejawada Chanikya Naidu bertujuan untuk membahas peran LSM pada nelayan dalam fokusnya pada perikanan.⁵ Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep peran LSM untuk pembahasannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LSM secara proaktif mengadvokasi mitigasi dan menumbuhkan kesadaran. Dengan menjembatani penelitian, kebijakan, dan pendidikan, mereka memicu gerakan global menuju ekosistem laut yang berkelanjutan.

Peran LSM juga mencakup kegiatan pemberdayaan yang dijelaskan pada artikel yang berjudul *“Peran Organisasi Non Pemerintah Human Initiative*

⁵ Meenatchi et al., *Navigating the Seas of Change: NGOs at the Helm of Fisheries Conservation and*, Jurnal Sosial Vol. 1, No. 1 (2023).

Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan” yang ditulis oleh Lina Wati bertujuan untuk mendalami peran organisasi non-pemerintah Human Initiative Sumatera Utara dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Medan, serta menganalisis potensi pemberdayaan tersebut melalui pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT.⁶ Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis SWOT. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, LSM Human Initiative Sumut didukung oleh PT. Pertamina telah menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kota Medan.

Selain itu, pada artikel yang berjudul “*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pesisir Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pasca Pembangunan PLTU Tanjung Jati B*” yang ditulis oleh Lifda Khoirunnisa ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan masyarakat pasca pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan Kecamatan Kembang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

⁶ Lina Wati, *Peran Organisasi Non Pemerintah Human Initiative Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan*, Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, (2022).

⁷ Lifda Khoirunnisa, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pesisir Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pasca Pembangunan PLTU Tanjung Jati B*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4 (2014).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini sangat berperan aktif bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus. Selain membantu masyarakat dalam pengembangan pekerjaan baru, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Desa Tubanan juga dinilai aktif seperti dengan melalui pemberdayaan maupun advokasi. Akan tetapi perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan dari LSM sehingga perlu adanya kerjasama antara LSM, masyarakat dan pemerintah desa dalam hal penyelesaian suatu kasus.

Kelompok kedua yaitu Advokasi LSM, hal ini mencakup advokasi LSM dalam permasalahan lingkungan. Artikel yang berjudul “*Advokasi Greenpeace Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup*” dan ditulis oleh Barik Ramdhani menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali data melalui observasi mendalam terhadap topik yang diteliti, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi.⁸ Artikel ini bertujuan untuk membahas advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap kasus kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan oleh korporasi meliputi masalah budaya korupsi, kesehatan maupun lingkungan.

Selanjutnya artikel yang berjudul “*Peran LSM ECOTON Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas*” yang ditulis oleh Dian Ardiansyah dan Agus Satmoko Adi dalam Jurnal

⁸ Barik Ramdhani, *Advokasi Greenpeace Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol. 3, No. 1 (2023).

Kajian Moral dan Kewarganegaraan.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran LSM ECOTON dalam memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menjelaskan permasalahan yang dialami oleh masyarakat di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ECOTON menjalankan perannya melalui berbagai inisiatif, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat diantaranya melalui program zero waste cities yang bertujuan menciptakan lingkungan bebas sampah serta melakukan advokasi lingkungan kepada pemerintah melalui aksi protes, pengajuan gugatan hukum, dan pendampingan langsung.

Kelompok ketiga, yaitu Kondisi Lingkungan Permukiman Nelayan. Kelompok ini menjelaskan bagaimana akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di pesisir masih relatif rendah. Seperti artikel yang berjudul “*Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan di Koridor Sungai Silugonggo, Desa Bendar, Kecamatan Juwana*”¹⁰ yang ditulis oleh Sania Fitri S, Mohammad Agung Ridlo, dan Boby Rahman ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kualitas lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kondisi kualitas lingkungan permukiman nelayan yang berada di sepanjang koridor Sungai Silugonggo, Desa Bendar, dengan meninjau pengaruh aktivitas permukiman di sekitar aliran sungai tersebut.

⁹ Dian Ardiansyah, *Peran LSM ECOTON Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 3 (2022).

¹⁰ Sania Fitri et al., *Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan di Koridor Sungai Silugonggo, Desa Bendar, Kecamatan Juwana*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung (2024).

Selanjutnya yaitu artikel yang berjudul “Environmental Quality Study of Pusong Lama Fisherman Settlement, Lhokseumawe City” dan ditulis oleh Nanda Sofia, Boy Marpaung and Dwira Nirfalini Aulia bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan permukiman nelayan sehingga dapat diketahui strategi/rencana penanganan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permukiman nelayan memiliki sistem pengelolaan air limbah dan sistem pengelolaan sampah berada pada kategori sedang sampai buruk. Sedangkan aspek bangunan tempat tinggal dan aspek aksesibilitas lingkungan berada pada kategori sedang.

Masalah yang hampir serupa juga ditemukan pada artikel yang berjudul “*Perspectives and Practices on Water, Sanitation, and Hygiene from a Fishing Community along Lake Malombe, Southern Malawi*” yang ditulis oleh Limbani R. Kalumbi, Chisomo Thaulo, Eleanor E. Mac Pherson dan Tracy Morse bertujuan untuk mengeksplorasi praktik dan perspektif tentang WASH di antara desa-desa nelayan di sekitar Danau Malombe, Malawi.¹² Penelitian ini menggunakan metode campuran berupa wawancara dan survey. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat nelayan kurang terlayani dan terpinggirkan dalam hal infrastruktur dan praktik WASH di tingkat rumah tangga dan komersial (produksi

¹¹ Nanda Sofia et al., *Environmental Quality Study of Pusong Lama Fisherman Settlement, Lhokseumawe City*, International Journal of Education and Social Science Research, Vol. 6, No. 3 (2023).

¹² Limbani Kalumbi et al., *Perspectives and Practices on Water, Sanitation, and Hygiene from a Fishing Community along Lake Malombe, Southern Malawi*, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, No. 18 (2020).

ikan). Masyarakat nelayan kekurangan fasilitas WASH dasar seperti air bersih, toilet yang lebih baik, dan fasilitas cuci tangan meskipun mereka dekat dengan sumber daya alam yang penting. Akses mereka terhadap air dan sanitasi dipengaruhi oleh topografi dan hidrogeologi. Praktik seperti pengolahan air, buang air besar yang aman (terutama di kalangan nelayan), dan cuci tangan secara keseluruhan kurang optimal di masyarakat nelayan, dan selanjutnya dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini, diantaranya jika penelitian sebelumnya cenderung masing-masing membahas peran LSM maupun advokasi lingkungan, penelitian ini lebih spesifik membahas peran LSM dalam advokasi nelayan. Fokus pada isu pelayanan dasar (air bersih, sanitasi, dan sampah) sebagai ruang analisis utama. Fokus dalam penelitian ini tidak hanya membahas peran LSM sebagai pendamping advokasi, tapi juga menganalisis capaian dari advokasi yang telah dilakukan berdasarkan kekurangan dan kelebihannya.

Intelligentia - Dignitas

Tabel 1.1
Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Sumber	Metodologi	Konsep	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Peran LSM ECOTON Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas</p> <p>Tahun: 2022 Nama Jurnal: Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nama Penulis: Dian Ardiansyah dan Agus Satmoko Adi</p> <p>https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/43205?utm</p>	Kualitatif	Konsep Peran	Membahas mengenai peran LSM dalam advokasi lingkungan	Perbedaan terletak pada teori dan tempat penelitian
2	<p>Peran Organisasi Non Pemerintah Human Initiative Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan</p> <p>Tahun: 2022 Nama Jurnal: Jurnal Magister Ekonomi Syariah Nama Penulis: Lina Wati</p> <p>https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jmes/article/view/1817</p>	Kualitatif	SWOT	Membahas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir	Artikel ini lebih membahas mengenai peran LSM dalam pemberdayaan ekonomi
3	<p>Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pesisir Desa Tubanan Kecamatan Kembang Pasca Pembangunan PLTU Tanjung Jati B</p> <p>Tahun: 2014 Nama Jurnal: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nama Penulis: Lifda Khoirunnisa</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/6530</p>	Kualitatif	Konsep Pemberdayaan	Membahas peran LSM dalam advokasi dan meningkatkan kesadaran melalui pemberdayaan masyarakat pesisir	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan
4	<p>Navigating the Seas of Change: NGOs at the Helm of Fisheries Conservation and Development</p> <p>Tahun: 2023</p>	Kualitatif	Konsep Peran	Fokus penelitian adalah peran LSM pada nelayan	Teori yang digunakan berbeda. Artikel ini lebih berfokus

No	Sumber	Metodologi	Konsep	Persamaan	Perbedaan
	<p>Nama Jurnal: Jurnal Sosial Nama Penulis: Meenatchi, Abuthagir Ibrahimi, Asha T. Landge, Bejawada Chanikya Naidu</p> <p>https://www.researchgate.net/publication/373806577_Navigating_the_Seas_of_Change_NGOs_at_the_Helm_of_Fisheries_Conservation_and_Development</p>				pada advokasi perikanan
5	<p>Advokasi Greenpeace Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Tahun: 2023 Nama Jurnal: Linimasa: Jurnal Al Tasyri'iyah Nama Penulis: Barik Ramdhani</p> <p>https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/40536/17984</p>	Kepustakaan	Konsep Advokasi	Meneliti tentang advokasi pada lingkungan	Perbedaan terletak pada metode yang digunakan
6	<p>Perspectives and Practices on Water, Sanitation, and Hygiene from a Fishing Community along Lake Malombe, Southern Malawi</p> <p>Tahun: 2020 Nama Jurnal: International Journal of Environmental Research and Public Health Nama Penulis: Limbani R. Kalumbi, Chisomo Thaulo, Eleanor E. Mac Pherson dan Tracy Morse</p> <p>https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6703</p>	Metode Campuran	Konsep Kualitas Lingkungan	Menjelaskan mengenai adanya permasalahan lingkungan pada masyarakat nelayan	Pada artikel ini lebih berfokus pada pengukuran kualitas lingkungan, tidak membahas keterlibatan LSM di dalamnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada advokasi LSM.
7	<p>Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan di Koridor Sungai</p> <p>Tahun: 2024 Nama Jurnal: Jurnal Ilmiah Sultan Agung</p> <p>Nama Penulis: Sania Fitri S, Mohammad Agung Ridlo, dan Bobby Rahman</p> <p>https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/38644</p>	Kualitatif	Konsep Kualitas Lingkungan	Membahas terkait permasalahan lingkungan di permukiman nelayan	Pada artikel ini hanya fokus kepada permasalahan lingkungan di permukiman nelayan sedangkan penelitian yang sedang dilakukan fokus pada peran advokasi LSM

No	Sumber	Metodologi	Konsep	Persamaan	Perbedaan
8	Environmental Quality Study of Pusong Lama Fisherman Settlement, Lhokseumawe City Tahun: 2023 Nama Jurnal: International Journal of Education and Social Science Research Nama Penulis: Nanda Sofia, Boy Marpaung and Dwira Nirfalini Aulia https://ijessr.com/link5.php?id=796	Kualitatif Deskriptif	Konsep Kualitas Lingkungan	Membahas terkait permasalahan lingkungan di permukiman nelayan	Pada artikel ini hanya fokus kepada permasalahan lingkungan di permukiman nelayan sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada peran advokasi LSM

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Pendamping Swadaya Masyarakat (LPSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara.¹³ Berbagai ahli dari sejumlah negara mendefinisikan “*civil society*” sebagai wujud dari aktualisasi individu maupun tatanan masyarakat yang mandiri, tidak berada di bawah kendali negara, serta memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuasaan atau pemerintah. Civil society juga ditandai dengan keberadaan ruang publik untuk menyampaikan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga independen yang

¹³ Ari Ganjar Herdiansah, *PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA*, Vol. No. 1, (Sumedang : Universitas Padjadjaran, 2016). Hal. 50.

mampu menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik sehingga salah satu bentuk dari civil society tersebut adalah keberadaan lembaga tersebut.¹⁴

Menurut Fakih, Ornop tidak dapat dipungkiri kehadirannya dalam gerakan sosial di Indonesia. Fakih, meletakkan Ornop sebagai salah satu organisasi gerakan sosial dimana ia melihat bahwa organisasi tersebut dengan asumsi bahwa Ornop tersebut memiliki keberpihakan kepada rakyat.¹⁵ Lembaga tersebut memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat serta menjalankan fungsi advokasi untuk membela kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan karakteristiknya, Hikam menjelaskan bahwa LSM menjalankan berbagai misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri, tanpa bergantung pada negara maupun sektor swasta. Hal ini mencerminkan esensi dari gagasan dan praktik kehidupan masyarakat sipil.¹⁶ Hikam juga menyatakan bahwa kekuatan utama LSM terletak pada kemampuannya dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai kegiatan, seperti pendampingan, advokasi, dan penyadaran. Selain itu, LSM juga berperan dalam menyebarluaskan pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga. Beberapa perannya yaitu:

a. Countervailing Power

¹⁴ Kunawi Basyir, *Menyapa MASYARAKAT MADANI Di Bumi Seribu Pura*, (Surabaya : CV. Global Aksara Pers, 2021). Hal. 3-4.

¹⁵ Yeni Huriani, *Agama dan Gender*, (Bandung : LEKKAS, 2021). Hal. 94-95.

¹⁶ Muhammad Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), Hal. 200-206.

Berlandaskan pada gerakan masyarakat sipil, biasa hadir sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dalam melakukan segala bentuk upaya preventif seperti meninjau, mengawal, dan membendung upaya dominasi yang dilakukan negara maupun pelaku praktik industri ekonomi dengan tujuan utama sebagai check and balance terhadap segala bentuk kekuasaan negara. Peran kritis, transformatif, dan konfliktual inilah yang biasa dimainkan Ornop melalui pendekatan seperti advokasi kebijakan, lobi, pernyataan politik, petisi, protes, dan aksi unjuk rasa di tingkat nasional, bahkan internasional.

b. Empowerment

Sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat sipil yang hadir sebagai gerakan pemberdayaan (*Empowerment*) masyarakat. Peran yang dijalankan mencakup aksi pengembangan keorganisasian dari segi kapasitas, produktivitas, serta kemandirian dari kelompok masyarakat seperti timbulnya kesadaran masyarakat dalam menggalang partisipasi, membangun keswadayaan, menjaga kemandirian guna memperkuat hak-hak warga negara. Peran pemberdayaan ini biasanya diintegrasikan melalui jalur pendidikan, pengorganisasian, pelatihan, penerangan, dan menjelajahi metodologi alternatif yang memiliki penerimaan baik menyangkut kepentingan masyarakat luas.

c. Intermediary Institution

Berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary Institution*) yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah atau negara maupun dengan aktor-aktor non-negara seperti dunia usaha dan lembaga funding. Perannya sebagai mediator juga digunakan untuk memperantarai atau sebagai aktor jembatan antara masyarakat dengan pelaku politik langsung atau dengan jejaring kelompok masyarakat lain.

Namun Ismid Hadad memberikan perbedaan dengan memisahkan antara kelompok primer (kelompok-kelompok tani, paguyuban-paguyuban di komunitas dan serikat-serikat rakyat) dan kelompok sekunder (kelompok yang membantu pendirian dan pengembangan kelompok primer). Kelompok primer tersebut lebih tepat disebut sebagai LSM, sedangkan kelompok sekunder yang bertindak sebagai fasilitator atau mediator atau perantara disebut sebagai LPSM.

Hadad menekankan bahwa LSM memiliki keterkaitan yang organik dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesungguhnya sehingga tidak ada aspek representasi karena LSM adalah presentasi langsung dari kepentingan rakyat banyak. Sedangkan organisasi yang bertebaran di perkotaan yang anggotanya merupakan lulusan universitas meskipun terkait dengan kegiatan tani dan buruh tidak dapat disebut sebagai LSM karena tidak ada petani dan buruh sungguhan di dalamnya sehingga LPSM memang adalah kategori yang secara fungsional paling cocok. Namun belum semua sepakat dan menerima pengistilahan ini.¹⁷

¹⁷ Robertus Robet, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia*, (Jakarta : ELSAM, 2008). Hal. 16-17.

1.6.2 Advokasi

Menurut Mansour Fakih, advokasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.¹⁸ Advokasi bertujuan untuk mengubah, memperbaiki, atau mempertahankan suatu kebijakan tanpa bermaksud merebut atau menguasai kekuasaan politik. Advokasi merupakan bentuk tindakan yang ditujukan untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang berpotensi merugikan. Secara umum, advokasi mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk membangun kesadaran publik terhadap suatu isu dan mendorong para pembuat kebijakan agar mengambil tindakan untuk mengatasinya.

Advokasi adalah tindakan mendukung sebuah ide, kebutuhan, individu, atau kelompok. Pelaku advokasi berusaha untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan orang lain demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pelaku advokasi berbicara dan mengambil tindakan untuk melakukan perubahan. Advokasi juga mencakup niat untuk mengadvokasi, tindakan mengadvokasi, dan dampak advokasi terhadap berbagai pemangku kepentingan. Advokasi cenderung terkait dengan peran dan serangkaian keterampilan, perilaku, dan hubungan

¹⁸ Mansour Fakih, *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*, (Yogyakarta : INSISTPress, 2016). Hal. 85.

interpersonal lainnya, termasuk menciptakan organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan secara umum menjadi pemimpin, pelobi, dan negosiator.¹⁹

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokas. Namun beberapa prinsip dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses dan kelemahan advokasi adalah ketika tidak memenuhi prinsip tersebut. Beberapa prinsip advokasi menurut Edi Suharto yang di antaranya²⁰ :

1.) Realistis

Advokasi yang efektif bertumpu pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan dapat diukur. Mengingat tidak semua hal dapat ditangani sekaligus, perlu dilakukan seleksi dan penentuan prioritas secara cermat.

2.) Sistematis

Prinsip ini menekankan pentingnya pengemasan informasi secara menarik serta pelibatan media secara optimal. Langkah advokasi dimulai dari pemilihan dan pendefinisian isu strategis, penguatan opini berbasis data, pemahaman terhadap sistem kebijakan publik, hingga pembangunan koalisi dan upaya mempengaruhi pengambil kebijakan.

¹⁹ Manuel London, *Understanding social advocacy : An integrative model of motivation, strategy, and persistence in support of corporate social responsibility and social entrepreneurship*, Journal of Management Development, Vol. 29 No. 3, (2010). Hal 225.

²⁰ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Corporate Social Responsibility*, (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal 167-172.

3.) Taktis

Advokasi membutuhkan pembentukan koalisi, aliansi, atau kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serupa dan hubungan yang dilandasi oleh rasa saling percaya.

4.) Strategis

Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Ada banyak tipe kekuasaan. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang diharapkan

5.) Berani

Advokasi yang dilakukan harus berani dan menysasar pada upaya perubahan dan rekayasa sosial yang dilakukan secara bertahap.

Advokasi dapat dilakukan oleh penyelenggara atau wirausahawan sosial dengan menciptakan lembaga formal atau semi-formal, seperti organisasi nirlaba untuk meminta sumbangan dan menyuarakan suatu tujuan. Advokasi memiliki beberapa ruang lingkup yaitu pemberdayaan, advokasi sosial atau politik, informasi publik, dan kolaborasi komunitas.²¹ Tujuan advokasi antara lain²² :

- 1.) Mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan pada persoalan-persoalan yang dialami oleh kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

²¹ David D. Hoff, *Advocacy : The TRAINER MODEL*, Journal for Social Action in Counseling and Psychology, Vol. 2 No. 1, (2009). Hal. 16.

²² Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring*, (Yogyakarta: UGM, 2011). Hal. 24.

- 2.) Berupaya mempengaruhi proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang sedang atau akan diterapkan.
- 3.) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rincian kebijakan, sistem yang berlaku, serta berbagai skema kesejahteraan sosial.
- 4.) Meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pola pikir individu maupun kelompok agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan tepat.
- 5.) Mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
- 6.) Menumbuhkan aktivis-aktivis keadilan sosial yang berasal dari kekuatan masyarakat sipil.
- 7.) Namun, untuk mewujudkan berbagai tujuan advokasi tersebut, diperlukan proses yang tidak mudah karena seringkali harus melalui berbagai bentuk negosiasi yang penuh dengan dinamika, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Advokasi dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat. Dalam lingkungan sosial yang lebih luas, advokasi dapat melibatkan pengambilan peran proaktif, tidak hanya untuk mewakili orang lain, tetapi juga untuk memberi energi dan menciptakan tekanan publik untuk suatu tujuan.

Menurut Valerie Miller dan Jane Covey, advokasi terdiri dari berbagai strategi yaitu dengan edukasi (pendidikan), kolaborasi (kerjasama), persuasi, litigasi, dan konfrontasi.²³ Hal yang melatarbelakangi perlunya advokasi adalah²⁴ :

- 1.) Proses perumusan kebijakan dinilai tidak berhasil menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2.) Para pengambil kebijakan cenderung tidak berpihak kepada kelompok marjinal dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok dominan.
- 3.) Kurangnya kompetensi pembuat kebijakan menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan.
- 4.) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pembuat kebijakan menghambat terjadinya perubahan sosial yang signifikan.
- 5.) Para pembuat kebijakan secara sengaja mengesampingkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pekerja sosial dalam advokasi berperan dalam membantu kliennya dalam menjangkau sumber-sumber, mengkoordinasi distribusi pelayanan sosial, maupun merancang serta mengembangkan kebijakan-kebijakan atau program-program kesejahteraan sosial. Pekerja sosial melihat masalah sesuai konteks, menggabungkan teknik praktik agar sesuai dengan situasi, dan menerapkan keterampilan untuk mengintervensi di berbagai tingkat sistem. Menurut Dubois

²³ Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). Hal. 12.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 19.

dan Miley bahwa dalam kajian advokasi, strategi advokasi dibagi ke dalam tiga setting atau aras, yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro.²⁵

1.) Aras Mikro

Pekerja advokasi dalam aras mikro berperan sebagai broker sosial dalam menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang ada di lingkungan sosial. Aras ini berfokus pada individu, keluarga, atau kelompok kecil untuk mendorong perubahan dalam fungsi pribadi, dalam hubungan sosial, dan dalam cara orang berinteraksi dengan sumber daya sosial dan kelembagaan. Meskipun aras mikro berusaha menciptakan perubahan pada individu, keluarga, dan fungsi interpersonal, pekerja advokasi tidak selalu mengarahkan upaya mereka menuju perubahan individu itu sendiri. Pekerja advokasi dapat membantu mendorong perubahan dalam sistem lain, termasuk perubahan dalam lingkungan sosial dan fisik untuk memfasilitasi perbaikan dalam individu atau fungsi sosial keluarga. Metode advokasi yang dapat dilakukan dalam aras mikro adalah pendidikan publik dengan tujuan memberikan pemahaman tentang masalah sosial. Dengan pemahaman yang diberikan, baik individu maupun kelompok kecil masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam proses advokasi. Pendidikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan dialog, forum warga, sosialisasi, lokakarya, konferensi, maupun kunjungan. Selain itu, penggunaan media dalam melakukan pendidikan publik juga dimungkinkan dengan tujuan membangun dukungan

²⁵ Karla Krogsrud Miley and Brenda Dubois, *Generalist Social Work Practice*, (USA: Pearson Education, 2014). Hal. 9-14.

publik. Strategi yang dapat dilakukan adalah penyediaan data, artikel, dan kebijakan alternatif terhadap media seperti penggunaan pesan kreatif.

2.) Aras Mezzo

Pada aras mezzo, pekerja advokasi mendampingi dalam mengidentifikasi masalah sosial bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi yang potensial, memobilisasi sumber, dan melakukan monitor pada kelompok-kelompok formal dan organisasi. Teknik advokasi dilakukan dengan membangun jaringan (*networking*) untuk mengkoordinasi dan mengembangkan pelayanan sosial, berkolaborasi dengan berbagai kelompok serta tokoh yang memiliki tujuan yang sama.

3.) Aras Makro

Pekerja advokasi pada aras makro berperan sebagai analis kebijakan dan terlibat langsung dalam gerakan sosial bersama masyarakat. Pekerja advokasi bertujuan mencapai perubahan sosial melalui pengorganisasian lingkungan, perencanaan komunitas, pendidikan publik, pengembangan kebijakan, dan aksi sosial. Pekerja advokasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial, memobilisasi dukungan untuk memperbaiki kondisi yang tidak adil, melakukan lobby, dan melancarkan aksi kelas di samping mengidentifikasi masalah dan kebutuhan publik, memonitor reaksi pemerintah terhadap masalah, mengajukan usulan kebijakan, dan memantau pelaksanaan kebijakan.

1.6.3 *Water, Sanitation, and Hygiene (WASH)*

Menurut Soemarwoto, kualitas lingkungan diartikan sebagai sejauh mana suatu lingkungan mampu secara nyata menyediakan hunian yang layak bagi penghuninya, yang dinilai berdasarkan beberapa unsur, seperti kondisi fisik rumah dan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks sosial-ekonomi, kualitas permukiman biasanya diukur melalui indikator seperti tingkat pendapatan, jenjang pendidikan, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam pembangunan lingkungan tempat tinggal mereka. Sementara itu, Salim dalam kutipan Adyani menekankan bahwa keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan, serta rendahnya pendapatan akan berpengaruh terhadap buruknya kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, kualitas lingkungan permukiman juga sangat bergantung pada akses terhadap fasilitas WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*), yang mencakup ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi seperti WC dengan septictank, tempat mandi dan buang air, saluran pembuangan tinja, serta sistem pengelolaan sampah yang memadai.²⁶

Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) sering kali dianggap kurang menarik dalam agenda pembangunan, sedangkan keterbatasan akses terhadap layanan ini membawa dampak yang sangat besar. Kekurangan air bersih, sanitasi, dan praktik higiene yang layak berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pendapatan, pola

²⁶ Adyani, Roychansyah, & Sarwadi, Tesis: “*Hubungan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Tingkat Kesehatan Masyarakat di Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Winongo Kota Yogyakarta*” (Yogyakarta: UGM, 2018). Hal. 1-2.

konsumsi, serta kondisi lingkungan semuanya merupakan aspek krusial yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Adapun salah satu dampaknya bagi kesehatan adalah stunting yang disebabkan oleh diare akibat kekurangan gizi. Air (*water*) merupakan elemen penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar makhluk hidup, termasuk untuk air minum dan keperluan rumah tangga lainnya. Untuk dikonsumsi sebagai air minum, air tersebut harus dalam kondisi bersih.

Sanitasi (*sanitation*) merupakan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan cara memutus rantai penularan dari sumbernya. Sanitasi termasuk dalam bagian dari kesehatan masyarakat yang berfokus pada pengendalian berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi tingkat kesehatan. Umumnya, sanitasi mencakup fasilitas seperti toilet, saluran pembuangan air limbah (SPAL), dan sistem pengelolaan sampah. Sementara itu, kebersihan (*hygiene*) adalah upaya menjaga dan melindungi kebersihan individu maupun benda, misalnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih untuk menjaga kebersihan tangan, mencuci peralatan makan, atau membuang bagian makanan yang rusak demi menjaga kualitas makanan. *Hygiene* menekankan pada pencegahan penyakit melalui perawatan diri dan lingkungan tempat tinggal. Penerapan WASH, yang mencakup akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang layak, serta perilaku hidup bersih, terbukti efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan risiko penyakit, dan memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal.

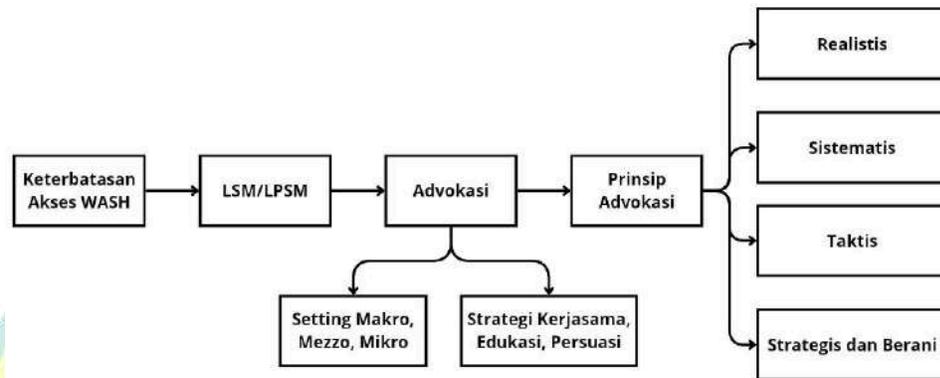
1.7 Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan kerangka konsep yang sudah dijelaskan, peneliti akan membuat hubungan antar konsepnya. keterbatasan akses WASH menjadi permasalahan sosial yang memerlukan intervensi oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu LPSM. Lembaga tersebut merupakan sebagai bentuk *civil society* memiliki peran dalam mengimbangi kekuatan negara dengan cara mengawasi dan mengontrol kebijakan publik yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Salah satu lembaga yang menjalani peran tersebut adalah FITRA melalui advokasi yang dilakukan. Advokasi tidak hanya berfokus pada pengawasan kebijakan publik, tetapi juga menekankan pada proses membangun kesadaran masyarakat. Dalam melakukan advokasi, dapat dianalisis bahwa LPSM menyusun strateginya dalam bentuk edukasi, persuasi, dan kerjasama. Selain itu advokasi yang dilakukan dapat dianalisis dengan menggunakan konsep setting advokasi seperti setting mikro, mezzo, dan makro.

Pada akhirnya, strategi yang diterapkan diharapkan akan menimbulkan efek atau implikasi tertentu, baik dalam bentuk perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun realisasi dalam perbaikan akses terhadap layanan WASH, serta kelebihan dan kekurangan advokasi yang juga akan dianalisis menggunakan konsep prinsip advokasi menurut Suharto. Pemahaman mengenai advokasi serta kelebihan dan kekurangannya diperlukan untuk mencari solusi yang tepat guna merancang strategi advokasi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Skema 1.1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami, menggali, dan menjelaskan makna atau fenomena utama yang muncul dari isu-isu sosial atau kemanusiaan yang dialami individu maupun kelompok.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dilihat dari sudut pandang perilaku ataupun tindakan. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena membutuhkan informasi dan deskripsi secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan peran FITRA dalam advokasinya pada

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi kedua* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 226.

nelayan Dadap serta akan dianalisis oleh konsep atau teori yang sesuai dengan penelitian.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini melibatkan kelompok utama, yaitu Seknas FITRA sebagai individu yang memiliki peran dalam advokasi yang dilakukan FITRA pada tata kelola air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di permukiman nelayan Dadap. Sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian terkait dengan FITRA pada advokasinya, peneliti kemudian memilih tiga staf FITRA dengan berbagai divisi sebagai informan utama. Pemilihan informan utama ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan variasi tugas masing-masing informan.

Selain itu untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, peneliti juga dengan sengaja memilih dua perwakilan nelayan yang tinggal di Dadap sebagai informan pendukung. Ketiga nelayan ini dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait advokasi FITRA di wilayahnya dan permasalahan yang sedang diperjuangkan oleh FITRA. Selain itu perwakilan nelayan dinilai sebagai individu yang mewakili masyarakat pesisir dalam menyampaikan permasalahan dan realisasi maupun dampak dari advokasi yang sudah dilakukan FITRA.

Tabel 1.2 Karakteristik Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Posisi Informan

1	SB	42 tahun	Perempuan	S2	Divisi Hukum, HAM, dan Demokrasi
2	GR	34 tahun	Laki-laki	S1	Manajer Analisis Anggaran SDA dan LH
3	AH	38 tahun	Laki-laki	-	Direktur FITRA Jawa Barat
4	RS	40 tahun	Perempuan	SMA	Ketua KPPI
5	DS	27 tahun	Laki-laki	S1	Sekretaris KNTI

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Informan utama yang akan peneliti pilih untuk wawancara adalah SB, GR, dan AH. SB merupakan staf FITRA dalam bidang Hukum, Demokrasi, dan HAM dipilih sebagai salah satu informan utama karena merupakan staf FITRA yang paling aktif terlibat dalam advokasi lingkungan permukiman nelayan, sehingga dinilai mengetahui banyak informasi terkait dengan peran FITRA di dalamnya. Selain itu peneliti juga memilih AH sebagai informan karena pernah terlibat langsung dalam mengadvokasi nelayan dengan pemangku kebijakan maupun program pelatihan. Lalu peneliti memilih GR untuk menjadi informan karena saat

ini sedang menjabat sebagai Manajer Analisis Anggaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sehingga terlibat langsung dalam riset yang dilakukan FITRA terhadap permasalahan atau anggaran WASH pada permukiman nelayan Dadap.

Untuk informan pendukung, peneliti memilih informan dari pihak perwakilan nelayan, peneliti memilih perwakilan nelayan seperti RS yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris KPPI dan DS yang juga merupakan Sekretaris KNTI untuk menjadi informan pendukung karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan WASH yang dihadapi oleh nelayan Dadap, proses advokasi FITRA, dan hasil atau dampak dari advokasi yang telah dilakukan oleh FITRA.

1.8.3 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai peneliti, perencana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan sebagai penyimpul data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Peneliti melakukan observasi di lokasi permukiman nelayan Dadap karena merupakan target dalam advokasi FITRA dengan memperoleh pemahaman mendalam terkait dengan proses advokasi yang dilakukan FITRA dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yakni staf FITRA sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengadvokasian, serta perwakilan nelayan untuk menggali informasi secara lengkap mengenai

permasalahan dan penilaian mereka atas advokasi yang sudah dilakukan oleh FITRA.

1.8.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih melibatkan dua tempat utama, yaitu Sekretariat Nasional FITRA dan permukiman nelayan di Kelurahan Dadap. Sekretariat Nasional FITRA terletak di Komplek Bumi Sarinah Estate, Jl. Cikoko Barat Dalam Blok D1, Pancoran, Jakarta Selatan yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Kawasan ini menjadi salah satu tempat di mana terdapat staf FITRA yang sedang melakukan aktivitas pekerjaannya.

Selain itu, Peneliti juga memilih Kelurahan Dadap, yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sebagai sasaran lokasi penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan serangkaian pengamatan awal di lokasi tersebut. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa lokasi permukiman nelayan Dadap yang ternyata relatif kumuh karena tidak adanya sistem pengelolaan dan pembuangan sampah, serta terbatasnya toilet juga menjadi permasalahan utama yang ditemukan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu mulai dari bulan Januari tahun 2025 hingga bulan Juli di tahun yang sama. Selama periode tersebut, peneliti melakukan berbagai kegiatan, termasuk

observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan data dengan pihak Sekretariat Nasional FITRA dan warga atau nelayan di Kelurahan Dadap.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam penyajian penelitian, kegiatan pengumpulan data menghasilkan data, kemudian data yang terkumpul dianalisis dan diuraikan. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan tiga buah metode yaitu :

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dengan cara mengamati berbagai kegiatan FITRA dan hubungan antara FITRA dengan stakeholder maupun warga yang dilakukan advokasi. Selain itu Peneliti melakukan observasi di permukiman nelayan Dadap untuk mengetahui mengenai permasalahan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di permukiman nelayan Dadap.

2. Wawancara Mendalam

Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan keterangan dari informan. Peneliti wawancara dengan sejumlah staf FITRA yang aktif dalam

melakukan advokasi pada permasalahan nelayan Dadap. Dengan wawancara ini peneliti dapat melihat persepsi informan, sesuai dengan perkataan Koentjaraningrat bahwa wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Wawancara berfokus mencakup pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mendorong partisipan berbagi pengalaman dan perspektif mereka secara mendalam. Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari Staf FITRA mengenai advokasi yang dilakukan untuk memperjuangkan akses kehidupan yang layak pada nelayan Dadap.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, Peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan utama dan dua informan pendukung. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara secara langsung dengan informan, tetapi juga melakukan wawancara melalui whatsapp dan juga zoom meeting. Wawancara dilakukan secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan bahasa yang lebih sederhana agar informan mudah memahaminya.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Peneliti merekam segala aktivitas yang berkaitan dengan wawancara untuk mengambil data dengan menggunakan alat bantu seperti kamera dan alat rekaman. Dengan melalui media dokumentasi foto dan rekaman merupakan

sumber primer yang signifikan dalam penelitian ini. Sedangkan studi literatur menurut Danial dan Warsiah adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dokumen yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini salah satunya adalah berkas, laporan hasil riset, dan website yang dimiliki oleh FITRA. Selain itu Peneliti juga mendapatkan dokumentasi pribadi berupa foto yang diberikan oleh informan pendukung. Studi literatur atau studi pustaka juga bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif diperlukan tahapan pengolahan dan analisis data. Peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu dengan mengikuti model analisis data yang terdiri dari pengumpulan data dari transkrip wawancara, pengamatan, data lapangan, dan dokumentasi. Kemudian reduksi data yang mengacu pada proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data. Selanjutnya penyajian data mengacu pada proses penyajian data dalam bentuk tulisan yang dapat berbentuk tabel, kutipan wawancara, dokumen, dan gambar dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman serta memberikan gambaran yang jelas terkait temuan-temuan

penelitian. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi merujuk pada proses menghubungkan hasil penelitian dengan tujuan penelitian dan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya, serta memberikan kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan.

1.8.7 Triangulasi Data

Peneliti menggunakan menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan sumber dan data agar penelitian ini menjadi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan tujuannya untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai advokasi FITRA pada nelayan Dadap, penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi pada pengumpulan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan melibatkan berbagai perspektif kunci, termasuk wawancara mendalam dengan Staf FITRA yang terlibat langsung dalam proses advokasi, serta Peneliti juga wawancara dengan perwakilan nelayan Dadap untuk mendapat informasi mengenai permasalahan yang sedang FITRA advokasi dan pandangan mereka terhadap advokasi tersebut.

Selain itu untuk Triangulasi, Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai lembaga yang pernah melihat dan berinteraksi dengan FITRA di Dadap. Sedangkan pada aspek metode pengumpulan data, triangulasi

dilakukan melalui observasi lapangan di Seknas FITRA dan permukiman nelayan Dadap untuk mengamati secara langsung kegiatan dan permasalahannya serta studi dokumentasi untuk memperoleh informasi sekunder yang mendukung penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang terbagi menjadi tiga yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada BAB 1 pendahuluan, BAB II dan III temuan penelitian, BAB IV analisis, dan BAB V penutup yang akan disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan temuan dan analisis konsep.

BAB I. Dimulai dari latar belakang penelitian yang menjelaskan terkait dengan LSM atau LPSM, FITRA, dan permasalahan keterbatasan akses WASH pada wilayah pesisir sehingga peneliti memfokuskan fenomena tersebut dan merangkumnya menjadi dua rumusan permasalahan, serta terdapat tujuannya untuk menjawab rumusan masalah dan mempertegas penelitian. Lalu terdapat tinjauan literatur sejenis yang juga dijelaskan sebagai literatur yang akan mendukung penelitian ini yang kemudian menjelaskan beberapa kerangka konsep sebagai alat analisis hasil temuan. Terakhir yaitu dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum FITRA dan Permukiman Nelayan Dadap. Pembahasan ini akan dibagi dalam beberapa sub

bab yaitu profil FITRA yang berisi latar belakang berdirinya, visi dan misi, serta sumber pendanaan FITRA. Lalu terdapat juga penjelasan mengenai gambaran umum lingkungan permukiman nelayan di Dadap yang menjelaskan terkait dengan lokasi dan penjelasan singkat mengenai permasalahan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Terakhir, dalam bab ini juga terdapat profil informan yang berisi deskripsi informan yang akan diwawancarai.

BAB III. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan hasil temuan penelitian yang terkait peran FITRA dalam advokasi lingkungan permukiman Dadap. Pada bab ini menjelaskan peran FITRA melalui berbagai langkah atau strateginya dalam advokasi. BAB ini terdiri dari peran FITRA dalam advokasi nelayan yang dijelaskan dalam beberapa sub bab seperti riset sebagai dasar advokasi, Advokasi dengan pemangku kebijakan, serta pemberdayaan dan pelatihan sebagai bagian dari advokasi.

BAB IV. Pada bab ini berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu analisis peran FITRA melalui teori advokasi yang meliputi strategi advokasi FITRA menggunakan konsep strategi advokasi Valerie Miller dan Jane Covey. Selain itu analisis kelebihan dan kekurangan FITRA melalui teori advokasi dengan menggunakan teori atau konsep prinsip advokasi menurut Edi Suharto. Terakhir, terdapat sub bab yang menjelaskan capaian advokasi FITRA.

BAB V. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan menjadi pertanyaan

penelitian. Dalam bab ini juga berisi saran dan masukan untuk masyarakat, FITRA, dan pemerintah.



Intelligentia - Dignitas